

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pasca Reformasi 1998, keterpilihan figur publik ditentukan secara langsung melalui mekanisme voting, baik dari pucuk tertinggi pemerintahan hingga ke arus bawah. Pemilihan langsung pemimpin publik oleh masyarakat menjadi episentrum lahirnya fondasi demokrasi substantif. Bahkan, melalui mekanisme pemilihan ini, adagium bahwa ‘suara rakyat adalah suara tuhan’ menemukan implementasinya.

Dalam pada itu, partisipasi politik masyarakat pasca Reformasi 1998 setidaknya bisa dilihat melalui di antaranya (1) menjamurnya asosiasi dan organisasi lembaga swadaya masyarakat sebagai produk demokratisasi sipil di negara berkembang; (2) munculnya kelompok identitas yang berbau ke dalam praksis politik, baik i identitas keagamaan maupun identitas etnis-ras. Meski demikian, dalam sistem pemilihan, masyarakat tidak sekadar menjadi obyek pasif, tetapi metamorfosis menjadi subyek yang secara aktif-partisipatif menentukan skema kekuasaan.

Hal tersebut juga ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Partisipasi publik Jakarta dalam kontestasi lima tahunan ini tercatat sangat tinggi. Bahkan, Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diikuti oleh tiga kandidat, yakni Paslon Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Paslon Nomor Urut 2 Basuki Tjahja Purnama-Jarot Saiful Hidayat, dan Paslon Nomor Urut 3 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, telah mencatat angka partisipasi publik paling tinggi dalam sejarah pagelaran Pilkada di Jakarta.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017 lalu telah mendeskripsikan bahwa publik mulai memiliki ketertarikan politik untuk menentukan sosok pemimpin mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mencatat, tingkat partisipasi publik DKI dalam Pilkada 2017 lalu mencapai angka 77 persen. Hal tersebut menjadi angka keikutsertaan tertinggi dalam sejarah Pilkada langsung di DKI Jakarta. Dengan begitu, praktis hanya tersisa 23 persen masyarakat yang tidak menentukan pilihan alias golput.

Data yang disebutkan KPU DKI Jakarta, angka partisipasi publik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012 hanya berkisar di 64,6 persen. Meski angka tersebut naik menjadi 66,8 persen pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2012. Sementara, pada Pilkada sebelumnya, yakni di tahun 2007, angka partisipasi publik tercatat hanya 65,41 persen. Melalui temuan ini, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu mendeskripsikan bahwa publik secara aktif-partisipatif telah memasuki lingkaran praksis politik untuk menentukan pemimpin Ibu Kota lima tahun ke depan.

Konsekuensi politis dari tingginya tingkat partisipasi publik dalam Pilkada DKI Jakarta adalah terbangunnya ruang komunikasi yang lebih inklusif dalam membantu memecahkan persoalan yang terus dirasakan publik Jakarta. Pada saat yang sama, publik Jakarta telah membangun diskursus yang lebih ilmiah dengan memutus siklus *a priori* terhadap percakapan politik. Politik, karena itu, telah melebur ke dalam percakapan sehari-hari masyarakat Jakarta. Sejauh hal tersebut dimaknai sebagai kontribusi terhadap skema program kerja kandidat, maka

diskursus politik di ruang publik akan berdampak positif terhadap segi kesejahteraan mereka.

Faktor kandidasi dengan latar belakang karir yang beragam memang menjadi nilai plus tingginya angka partisipasi publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. AHY dengan latar belakang militer berpasangan dengan perempuan birokrat, Sylivi, diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan PPP. Anies dikenal sebagai seorang intelektual dengan jabatan terakhirnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Sandi yang populer sebagai pengusaha. Mereka diusung Partai Gerindra dan PKS. Sementara Ahok-Djarot sebagai *incumbent* dengan sejumlah keberhasilan kepemimpinan di DKI Jakarta selama rentang 2012-2017 diusung oleh Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Ketiga kandidat tersebut bersaing dengan berusaha merebut pilihan politik Jakarta melalui beragam terobosan yang ditawarkan. Bahkan, simpati masyarakat diperoleh melalui adu data di setiap prosesi debat publik yang sama-sama disaksikan tidak hanya oleh warga Jakarta, tetapi publik Tanah Air.

Karena itu, Pilkada DKI Jakarta seperti menjadi perhelatan pemilihan nasional. Selain karena Jakarta adalah Ibu Kota dengan pusat pemerintahan nasional yang tersentral di sana, Pilkada DKI Jakarta juga menawarkan hal ihwal lain karena berkait-kelindan dengan momentum politik 2014 silam dan 2019 mendatang. Tidak hanya publik Jakarta, masyarakat di seluruh pelosok Nusantara bahkan juga memperdebatkan hal sama. Sehingga, atas alasan tersebut, kontestasi DKI Jakarta 2017 oleh banyak peneliti disebut sebagai pilkada rasa pilpres. Meski demikian, secara spesifik, *prototype* itu menunjukkan fakta sosio-politik yang

benar, bahwa kandidat yang diusung oleh koalisi partai di DKI Jakarta seperti menampilkan gejolak politik nasional 2014.

Dengan demikian, Pilkada DKI Jakarta seolah menjadi barometer peta kuasa dan arah pemerintahan politik Indonesia pasca Pilpres 2014 dan jelang Pileg-Pilpres 2019 mendatang. Pilkada DKI Jakarta 2017 menampilkan para ‘petarung lama’. Bahkan, tidak hanya itu, sejumlah pemimpin partai turun langsung untuk mengakomodir suara pemilih di arus bawah. Fenomena yang sangat jarang terjadi dalam percaturan politik daerah.

Selain hal tersebut, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menampilkan fenomena politik menarik. Pilkada yang digelar bersamaan dengan 101 wilayah lain di Indonesia itu menyuguhkan kekuatan politik sentimen daripada argumen rasional. Pertarungan wacana di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, terus memunculkan isu sentimen sektarian. Bahkan, Pilkada DKI itu seolah miniatur dari konfrontasi tak langsung sejumlah kubu dengan menghadirkan isu sensasional-reaksioner, seperti isu agama.

Pada penghujung 2016 lalu, peristiwa pergolakan politik dengan domain agama menuliskan ihwal baru dalam sejarah demokratisasi di Indonesia. Munculnya beragam isu terkait sentimen agama dan ras justru membuat hubungan harmonis agama dan politik mulai terurai. Momentum politik dengan melibatkan isu agama dan ras mulai terlihat, hingga pada saat bersamaan, kecenderungan hubungan antara agama dan politik mulai tampak destruktif. Jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, aksi protes dari kalangan Islam dengan nama ‘Aksi Bela Islam’ terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan melibatkan massa puluhan ribu hingga jutaan digelar sebanyak tiga kali. Aksi tersebut sebagai respon atas ucapan

kontroversial Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang disebut menista agama terkait pidato kedinasan di Kepulauan Seribu. Aksi protes kepada Ahok tersebut dilakukan oleh kaum Muslim pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Aliansi kelompok Islam yang memprotes perkataan Ahok karena dinilai menista Islam adalah antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), dan puluhan organisasi Islam lain.

Kasus penistaan agama yang kini membawa Ahok dihukum penjara itu rupanya menjadi efek gunung es dalam eskalasi politik DKI Jakarta. Pertarungan memperebutkan DKI 1 dan DKI 2 makin sengit dan panas. Bahkan, isu yang kemudian terus berkembang dalam percakapan publik justru banyak bersinggungan dengan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Kasus penistaan agama Ahok telah melahirkan friksi-friksi baru yang mengakibatkan instabilitas politik sehingga menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional. Muncul pula kekhawatiran akan benturan konfrontasi horizontal yang mengatasnamakan agama dalam Pilkada DKI Jakarta. Sehingga, atas dasar itu, sebanyak 30.000 perwira militer dan polisi dikerahkan untuk mengantisipasi kericuhan jelang dan pasca Pilkada.

Potensi suara kalangan Islam kemudian dimanfaatkan oleh jejaring politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Bagaimanapun, kasus penistaan agama telah memangkas angka elektabilitas Ahok secara signifikan. Jejak pendapat Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa 57 persen responden setuju bahwa Ahok telah menghujat agama, sehingga mereka akan beralih pilihannya kepada paslon lain,

yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang memang sejak awal direpresentasikan sebagai sosok muda agamis yang santun, ramah, dan cerdas. Potensi suara tersebut dimanfaatkan oleh jejaring politik Anies untuk mendapatkan simpati konstituen. Usaha tersebut tampak membuahkan hasil. Pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, Anies-Sandi berhasil menyaingi Ahok-Djarot untuk maju di putaran kedua, sementara AHY-Sylvi harus terhenti di babakan pertama.

Jejaring politik Anies-Sandi begitu lihai memanfaatkan peluang suara konstituen dengan terus mengandalkan isu agama dan ras. Anies-Sandi mengambil simpati pemilih Muslim dengan terus menyambung interaksi politik dengan sejumlah lembaga keagamaan Islam. Bahkan, figur politik partai yang mengusung Anies-Sandi juga memanfaatkan propaganda agama sebagai bagian strategi untuk mengakomodir pemilih.

Friksi akibat video Ahok di Kepulauan Seribu tersebut digunakan oleh aktor politik Anies-Sandi untuk menarik kemenangan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Konfigurasi politik ini yang secara signifikan tergambar dalam peta politik Pilkada DKI Jakarta putaran pertama hingga putaran kedua.

Bagaimanapun, pasal penistaan agama yang disematkan kepada calon petahana, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, secara simultan juga telah menggiring pemilih Muslim untuk berlabuh kepada pasangan Anies-Sandi. Personifikasi terhadap sosok Anies-Sandi yang kontranaratif dengan Ahok memang menjadi daya tarik utama pemilih. Sementara itu, kerja mesin partai koalisi yang mengusung Anies-Sandi, yakni Gerindra dan PKS, yang kemudian juga disusul PAN, juga memanfaatkan friksi politik dengan melibatkan isu agama dan ras. Reaksi aktor politik Anies-Sandi terkait isu penistaan agama makin

meluas dan intensif. Bahkan, kotestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Islam dapat bergerak lebih intensif dan massif. Demikian pula, persaingan ketat Pilkada DKI Jakarta telah membawa dampak signifikan terhadap preferensi dan persepsi pemilih.

Tensi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terus memanas, meski jumlah pemilih tidak banyak di banding pilkada di daerah lain, yakni 7.218.254 pemilih di putaran kedua. Panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak bisa dilepaskan dari residu Pilpres 2014 dan 2009 antara Jokowi vs Prabowo plus kubu SBY. Kubu Jokowi dipresentasikan dalam pasangan Ahok-Djarot. Kubu Prabowo direpresentasikan oleh pasangan Anies-Sandi. Kubu SBY yang memenangkan dua Pilpres 2004 dan 2009 direpresentasikan oleh AHY-Sylvi

Selain pertarungan aktor politik “besar” tersebut, Pilkada DKI Jakarta menjadi “heboh” karena menyeret isu identitas dan keyakinan. Komodifikasi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terbentuk selain karena ada kandidat non-Muslim yang China, tetapi juga karena motif politik antara persekongkolan antara elite politik, tokoh agama, dan pebisnis besar yang sama-sama memiliki kecenderungan ambisius untuk menguasai Jakarta.

Karena itu, Pilkada DKI Jakarta telah melahirkan sejumlah bentuk friksi-friksi, terutama terkait dengan interaksi politik-agama. Buktinya, “teror teologis” banyak berlangsung di khutbah-khutbah Jumat sebagai medium untuk kampanye dan propaganda hingga larangan mengurus, mendoakan, dan menyolati jenazah yang sewaktu hidup mendukung paslon tertentu. Friksi tersebut lahir karena politik identitas lahir melalui meningkatnya intoleransi, ujar kebencian, konfrontasi, hingga berimplikasi terhadap perpecahan di masyarakat. Pada saat

yang sama, lahirnya friksi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memuluskan hajat politik demi memenangkan kandidat yang diusungnya.

Karena itu, dalam penulisan Tesis ini, peneliti mengambil judul “Friksi Politik-Agama dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022 (Studi atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies Baswedan-Sandiaga Uno)”. Instrumen politik formal Anies-Sandi, yakni basis konstituen, partai politik, dan relawan, bekerja begitu masif dengan mengandalkan isu agama dan ras. Domain itulah yang menjadi fokus peneliti untuk kemudian ditelaah lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana friksi politik-agama membentuk jejaring konstituen untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini secara substantif bertujuan mendapatkan dan mengolah informasi yang akurat berdasarkan permasalahan yang dirumuskan peneliti. Adapun tujuan penelitian ini secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui friksi politik terbentuk dan dimanfaatkan oleh jejaring konstituen untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017-20122.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai friksi politik yang terbentuk dan dimanfaatkan oleh jejaring konstituen untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017-2022.

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak bacaan literatur mengenai friksi politik yang terbentuk dan dimanfaatkan oleh jejaring konstituen untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017-2022.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang seperti, partai politik, mahasiswa, dan pemerintah. Manfaat lain riset ini bagi masyarakat adalah memberikan landasan berpikir dalam hal pentingnya pemahaman populisme Islam dan politik identitas dalam kontestasi politik di Indonesia.